**PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2013-2017**

Ai Sri Wahyuni

Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

M. Budiantara SE., M.Si., AK., CA

Dosen Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

**ABSTRAK**

Sri, Wahyuni, A. 2018. “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimew Yogyakarta pada tahun 2013-2017)”. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Pengalokasian Belanja Modal baik secara persial maupun secara simultan. Penelitian ini merupakan penelitian komperatif. Data Laporan Realisasi APBD diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara persial menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwaDana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**ABSTRACT**

“The influence of Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund to Capital Expenditures (Case study on Provinces in Daerah Istimewa Yogyakarta Period 2013-2017)”.

This study aims to determine the effect of Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, to Capital Expenditures either persial or simultaneously. This research is a comparative research. Data on APBD Realization Report is obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (www.djpk.kemenkeu.go.id). The method used to analyze the data in this study by using multiple linier regression analysis method.

The results of the research show that the Profit Sharing Fund has no effect on the Capital Expenditure, General Allocation Fund have an effect on the Capital Expenditure Special Allocation Fund has no effect on the Capital Expenditure. The result of simultaneous research shows that General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Profit Sharing Fund (DBH) simultaneously have an effect on to Capital Expenditure.

Keywords : Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan Pemerintah Daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah. Dengan itu, untuk mengatur segala kas milik daerah yang dipergunakan dalam pelayanan publik di daerah dapat diatur dengan mudah oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri sehingga tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi disambut baik oleh sebagian Pemerintah Daerah (Provinsi), namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012).

Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan menggunakan beban APBD. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dan Pinjaman Daerah. Sumber dana bagi daerah tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Halim, 2009). Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sering diukur dan digunakan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sehingga besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai Belanja Pemerintah Daerah (Kuncoro, 2007).

Dalam menangani pemberian transfer atau bantuan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terdapat campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti masih adanya sikap arogan Pemerintah Pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Untuk menghitung berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah seharusnya Pemerintah Pusat tidak menyulitkan departemen keuangan dalam melakukannya tugasnya. Menurut Saragih (2003) bahwa dikhawatirkan otonomi daerah mengalami penyempitan makna menjadi kebebasan untuk memungut pajak dan retribusi oleh daerah, terutama pada daerah-daerah yang minim sumberdaya alam sehingga hanya sedikit mendapatkan Dana Bagi Hasil (profit sharing). Otonomi daerah selama ini dalam kenyataanya tidak berhasil mengembangkan potensi daerahnya, tetapi lebih banyak mematikan potensi yang ada. Dengan demikian, pengalokasian Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah harus berjalan dengan baik karena Belanja Modal merupakan satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaan dalam Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap upaya pembangunan, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang tediri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga dana transfer dari Pemerintah Pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap Pemerintah Daerah (Provinsi) mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) untuk masing-masing daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017”.

**Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal.
2. Untuk mengrtahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap belanja modal.

**Permasalahan**

Dari latar belakang diatas maka muncul permasalahan yaitu “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017”.

**Manfaat**

Adapun manfaat mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, danaa alokasi khusus trehadap pengalokasian anggaran belanja modal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijaikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan damna alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1. Manfaat Praktis:

* Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambara dan acuan bagaimana seharusnya pemerintah daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta mengalokasikan sumber-sumber penapatan daerah secara lebih produktif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase alokasi belanja modal.
* Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih lanjut menegenai ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sektor publik, yaitu pemerintah daerah.

1. **LANDASAN TEORI**
2. **Belanja Modal**

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakn meningkat, begitu juga sebaliknya.

1. **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil. merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber‐sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan). Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

1. **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

1. **Dana Alokasi Khusus**

Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemuian menurut kebelakang melalui data untuk menemukan faktor-faltor yang mempengaruhi atau menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti (Alhamda, 2016: 5).

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai dari tahun 2013-2017.

1. **Populasi dan sampel**

Populasi menurut Sugiyono (2015: 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun 2013-2017.

1. **Jenis dan Sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diakses dari website (http:www//djpk.kemenkeu.go.id)

1. **Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitia ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017.

1. **Definisi operasional**
2. **Belanja Modal**

Belanja Modalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal tidak hanya merupakan pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah an mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Indikator untuk pengukuran Belanja Modal:

**Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan Mesin + Belanja Gedung dan Banguan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset lainnya.**

1. **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber‐sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan).

1. **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintash pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannyadiserahkan sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) adalah sebagai berikut:

**DAU = AD + CF**

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal)

1. **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

1. **Metode Analisa Data**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode statistik dengan menggunakan SPSS 20.1. metode analisis data yang digunakan adalah regersi linier berganda. Ananlisis ini dimaksudkan agar persamaan regresi tersebut layak digunakan atau diaplikasikan maka harus memenuhi uji asumsi klasik.

1. **Statistik Deskriptif**

Pada metode statistik deskriptif ini dimana proses untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

1. **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1. **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan berbagai metode penelitian. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

1. **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui akankah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIP). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabel-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1/Tolerance. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011).

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Sunyoto (2016:90) menyatakan bahwa Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Rank Spearman dengan melihat taraf signifikansi 0,05, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

1. **Uji Autokorelasi**

Menurut Supriyadi (2014: 60) uji autokorelasi merupakan salah satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau periode sesudahnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik dan tidak layak pakai prediksi. Salah satu cara untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Run Test. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Menurut Ghzali (2012: 120) jika nilai asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka tidak dapat masalah autokorelasi. Jika nilai asymp.sig lebiha kecil dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi.

1. **Model Regresi**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruhDana Bagi Hasil (DBH)), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Menurut Sugiyono (2013:277) secara matematika, regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

Y= α + β1 X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Koefisien Konstanta

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi

X1 = Dana Bagi Hasil

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

e = Tingkat Kesalahan (error)

Regresi linier berganda pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

1. **Uji Signifikansi**
2. **Uji Persial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara persial (Ghozali, 2011:98). Koefisien regresi Uji t ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hasil dari ouput SPSS, jika nilai Sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. **Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2011:98) menyatakan bahwa uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan melihat nilai signifikansi hasil dari ouput SPSS, jika nilai Sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. **PEMBAHASAN**

**Tabel 4.1**

**Kriteria Sampel**

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Kriteria |
| 1. | Kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempublikasikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan secara konsisten dari tahun 2013-2017. |
| 2. | Kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Daerah Iostimewa Yogyakarta mencantumkan data-data mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBD. |

Sumber: data yang diolash sendiri.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, jumlah Kabupaten yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2013-2017 kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan mencantumkan data secara lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperoleh sampel sebanyak 6 Kabupaten yang memenuhi syarat kriteria sampel dan layak untuk dianalisis. Kabupaten yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman. Dengan jumlah sampel sebanyak 6 Kabupaten, maka jumlah penelitian keseluruhan menjadi 6 x 5 = 30. Data yang diambil dari laporan Realisasi APBD selama 5 tahun yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Adapun rincian data sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Dana Bagi Hasil (DBH)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabuapten** | **Tahun** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Prov. DIY | 94.731 | 76.756 | 62.258 | 108.902 | 67.838 |
| Bantul | 36.485 | 26.466 | 26.632 | 33.336 | 21.164 |
| Gunung Kidul | 260.866 | 847.388 | 20.772 | 27.517 | 16.603 |
| Kulon Progo | 33.582 | 639.409 | 18.932 | 26.100 | 15.310 |
| Sleman | 50.369 | 952.102 | 38.282 | 61.833 | 225.393 |
| Kota Yogyakarta | 55.338 | 618.742 | 28.040 | 55.713 | 27.909 |

(dalam jutaan rupiah)

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**Tabel 4.3**

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **Tahun** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Prov. DIY | 828.335 | 899.923 | 920.545 | 940.034 | 1.380.357 |
| Bantul | 854.810 | 949.252 | 942.850 | 119.437 | 1.072.227 |
| Gunung Kidul | 779.069 | 847.388 | 872.567 | 388.622 | 1.024.164 |
| Kulon Progo | 594.979 | 639.409 | 657.260 | 317.911 | 718.491 |
| Sleman | 891.589 | 952.102 | 984.410 | 380.011 | 1.051.042 |
| Kota Yogyakarta | 597.212 | 618.742 | 622.365 | 241.294 | 670.279 |

(dalam jutaan rupiah)

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**Tabel 4.4**

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **Tahun** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Prov. DIY | 34.496 | 37.132 | 39.084 | 719.034 | 949.084 |
| Bantul | 47.197 | 60.914 | 72.360 | 119.437 | 322.064 |
| Gunung Kidul | 59.793 | 46.172 | 84.971 | 388.621 | 301.675 |
| Kulon Progo | 52.894 | 47.077 | 53.806 | 317.911 | 231.473 |
| Sleman | 50.823 | 36.504 | 29.421 | 380.011 | 317.082 |
| Kota Yogyakarta | 6.220 | 2.250 | 2.343 | 241.293 | 150.286 |

(dalam jutaan rupiah)

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**Tabel 4.5**

**Belanja Modal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **Tahun** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Prov. DIY | 369.396 | 442.446 | 627.602 | 947.406 | 1.040.564 |
| Bantul | 183.270 | 310.415 | 334.880 | 338.954 | 315.618 |
| Gunung Kidul | 156.373 | 127.290 | 238.175 | 260.199 | 340.667 |
| Kulon Progo | 123.314 | 146.577 | 226.058 | 307.589 | 294.669 |
| Sleman | 206.860 | 282.862 | 426.783 | 348.203 | 387.514 |
| Kota Yogyakarta | 167.080 | 193.078 | 256.395 | 313.356 | 294.401 |

(dalam jutaan rupiah)

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**4.2 Analisis Data**

1. **Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat melihat profil dari data penelitian ini dengan pengaruh yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif merupakan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif:

**Tabel 4.6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| DBH | 30 | 15310 | 260866 | 48895,20 | 46281,562 |
| DAK | 30 | 2250 | 949084 | 264250,37 | 247365,235 |
| BM | 30 | 123314 | 1040563 | 337837,87 | 207140,272 |
| DAU | 30 | 594980 | 1380357 | 854103,23 | 178962,448 |
| Valid N (listwise) | 30 |  |  |  |  |

Sumber: hasil Data SPSS yang diolah sendiri.

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah dari data yang ada pada variabel. N untuk semua variabel mempunyai jumlah yang sama yaitu 30.

Berdasarkan tabel 4.6, Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu variabel. Dapat diketahui nilai minimum Dana Bagi Hasil sebesar 15.310, Dana Alokasi Umum sebesar 594.980, Dana Alokasi Khusus 2.250, dan Belanja Modal sebesar 123.314.

Berdasarkan tabel 4,6, Maximum merupakan nilai terbesar dari suatu variabel. Dapat diketahui nilai maximum Dana Bagi Hasil sebesar 260.866, Dana Alokasi Umum sebesar 1.380.357, Dana Alokasi Khusus sebesar 949.084, dan Belanja Modal sebesar 1.040.563.

Berdasarkan tabel 4.6, Mean merupakan rata-rata dari data yang dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyak data yang ada. Dapat diketahui bahwa mean Dana Bagi Hasil sebesar 48.895,20, Dana Alokasi Umum sebesar 854.103,23, Dana Alokasi Khusus sebesar 264.250,37, dan Belanja Modal sebesar 337.837,23.

Berdasarkan tabel 4,6, Std. Deviation merupakan suatu indeks yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-ratanya. Dapat diketahui nilai Std. Deviation Dana Bagi Hasil sebesar 46.281,562, Dana Alokasi Umum sebesar 178.962,448, Dana Alokasi Khusus sebesar 247.365,235, dan untuk Belanja Modal sebesar 207.140,272.

1. **Uji Asumsi Klasik**
2. Uji Normalitas
3. Uji Normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesunguhnya, data penelitian tersebut harus di uji normal atau tidak normal distribusinya. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Berikut merupakan hasil uji normalitas:

**Tabel 4.7**

**Uji Normalitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 30 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 0E-7 |
| Std. Deviation | 145251,57101341 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,099 |
| Positive | ,099 |
| Negative | -,053 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,540 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,933 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |

Sumber: hasil Data SPSS yang diolah sendiri.

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,933 artinya nilai Kolmogrov-Smirnov > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan lolos dari uji normalitas.

1. Uji multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolonieritas. Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas:

**Tabel 4.8**

**Uji Multikolinieritas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -187784,212 | 158996,842 |  | -1,181 | ,248 |  |  |
| DBH | ,038 | ,684 | ,009 | ,056 | ,956 | ,810 | 1,235 |
| DAU | ,521 | ,197 | ,450 | 2,648 | ,014 | ,654 | 1,530 |
| DAK | ,297 | ,154 | ,355 | 1,932 | ,064 | ,561 | 1,782 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | | | |

Sumber: hasil Data SPSS yang diolah sendiri.

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu, Dana Bagi Hail, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus memiliki angka Variance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dan lolos uji multikolinearitas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4.9**

**Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | | | | |
|  | | | DBH | DAU | DAK | Unstandardized Residual |
| Spearman's rho | DBH | Correlation Coefficient | 1,000 | ,013 | ,153 | ,295 |
| Sig. (2-tailed) | . | ,947 | ,420 | ,114 |
| N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DAU | Correlation Coefficient | ,013 | 1,000 | ,434\* | -,239 |
| Sig. (2-tailed) | ,947 | . | ,017 | ,203 |
| N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DAK | Correlation Coefficient | ,153 | ,434\* | 1,000 | -,304 |
| Sig. (2-tailed) | ,420 | ,017 | . | ,103 |
| N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Unstandardized Residual | Correlation Coefficient | ,295 | -,239 | -,304 | 1,000 |
| Sig. (2-tailed) | ,114 | ,203 | ,103 | . |
| N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| \*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | |

Sumber: hasil Data SPSS yang diolah sendiri.

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus memiliki angka taraf signifikansi diatas 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas dan lolos dari uji heteroskedastisitas

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi atara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

**Tabel 4.10**

**Uji Autokorelasi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Runs Test** | |
|  | Abs\_Res\_1 |
| Test Valuea | 87123,35 |
| Cases < Test Value | 15 |
| Cases >= Test Value | 15 |
| Total Cases | 30 |
| Number of Runs | 13 |
| Z | -,929 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,353 |

a median

Sumber: hasil data SPSS yang diolah sendiri.

Berdasarkan tabel 4.10, Diketahui bahwa hasil uji Run Test menunjukan besaran nilai d sebesar 0,353. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Run Test (k, n) yang mana k menunjukkan jumlah variabel independen yaitu 3 variabel dan n adalah jumlah sampel sejumlah 30 sampel. Sehingga dapat diumpulkan tidak terjadi autokorelasi dan lolos dari uji autokorelasi.

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda.

**Tabel 4.11**

**Regresi Linier Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -187784,212 | 158996,842 |  | -1,181 | ,248 |
| DBH | ,038 | ,684 | ,009 | ,056 | ,956 |
| DAU | ,521 | ,197 | ,450 | 2,648 | ,014 |
| DAK | ,297 | ,154 | ,355 | 1,932 | ,064 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | |

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri.

Model Regresi Linier Berganda:

Y= a + bX1+bX2+bX3+e

Y= -187784,212 + 0,38 X1 + 0,521 X2 + 0,297 X3+ e

1. **Uji Signifikansi**
2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau secara persial. Berikut merupakan hasil uji t:

**Tabel 4.12**

**Uji t**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -187784,212 | 158996,842 |  | -1,181 | ,248 |
| DBH | ,038 | ,684 | ,009 | ,056 | ,956 |
| DAU | ,521 | ,197 | ,450 | 2,648 | ,014 |
| DAK | ,297 | ,154 | ,355 | 1,932 | ,064 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | |

Sumber : Data hasil SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa hasil uji t untuk H1 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,956. Nilai signifikansi variabel Dana Bagi Hasil nilai signifikansi 0,956≥ 0,05 yang artinya bahwa H1 dittolak sehingga Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 4.12, dapat disimpulkan hasil bahwa uji t untuk H2 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014. Nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum menunjukan nilai signifikansi 0,014< 0,05 yang artinya bahwa H2 diterima sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa hasil uji t untuk H3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,064. Nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus menunjukan nilai signifikansi 0,064≥ 0,05 yang artinya bahwa H3 diterima sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

1. Uji Simultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji F:

**Tabel 4.13**

**Uji f**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 632463133779,418 | 3 | 210821044593,139 | 8,959 | ,000b |
| Residual | 611842547574,049 | 26 | 23532405675,925 |  |  |
| Total | 1244305681353,467 | 29 |  |  |  |

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri.

Berdasarkan tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa hasil uji F diatas untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya H4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

* 1. **Pembahasan**

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) memberikan hasil penelitan yang berbeda dengan penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif bahwa nilai mean Dana Bagi Hasil sebesar 48.895,20 merupakan nilai paling rendah diantara nilai mean variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan jika Dana Bagi Hasil tidak cukup untuk membiayai Belanja Modal sehingga kebutuhan Belanja Modal perlu didukung oleh pendanaan yang lainnya. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, apabila pajak dan sumber daya alam pada daerah tersebut kecil, maka pembagian dari hasil pajak dan sumber daya tersebut akan kecil juga. Hal lain yang menyebabkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal menurut Imam Sumardjoko dan Andry Irwanto (2015) menyatakan bahwa terdapat perbedaan penggunaan sampel, periode waktu yang berbeda dan karakteristik Dana Bagi Hasil yang bersifat block grant atau memberi keleluasaan pada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut pada belanja yang bersifat produktif.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erdy Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015) memberikan hasil peneltian yang sama dengan penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tujuan awal Dana Alokasi Umum adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka Dana Alokasi Umum yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka Dana Alokasi Umum yang diperoleh daerah tersebut akan rendah. Hal ini membuktikan bahwa perilaku Belanja Daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum. Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat, hal ini disebebkan karena daerah yang memiliki pendapatan daerah berupa Dana Alokasi Umum yang besar maka Belanja Modal akan meningkat.

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukan dengan tingkat signifikansi 0,064> 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada Dana Alokasi Khusus tidak turut menaikan pengalokasian Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Menurut Kuncoro (2004), Dana Alokasi Khusus ditunjukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus yang mana dalam hal ini bidang-bidang dibiayai dari DAK terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana dan kehutanan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Kuncoro diatas yang mana Dana Alokasi Khusus tersebut hanya membiayai pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan yang lainnya, yang mana ini tidak memerlukan dana yang cukup besar, berbeda dengan belanja modal yang memerlukan dana yang cukup besar.

Jadi Dana Alokasi Khusus tidak mengalokasian anggaran untuk belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus ini merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai atau untuk pembiayaan dari pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat khusus seperti sarana dan prasarana fisik daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil yang didapat oleh Rihfenti Ernayani (2017) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keempat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelanjaan aset tetap yang diperoleh daripelayanan kepada masyarakat yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum, mendanai kegiatan khusus didaerah yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus dan mendanai kebutuhan daerah yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil saling mengikat untuk mendanai kebutuhan Belanja Modal.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
2. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal

b. saran

Saran dalam penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau memperluas sampel penelitian lainnya dan dapat mengembangkan variabel yang lebih bervariasi lagi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adyatma. E., serta Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi.

Alhamda. S. (2016). Buku Ajar Metlit dan Statistik. CV Budi Utama: 2016.

Darmawanto & Yustikasari. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi. Makasar.

Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.

KSAP. (2016). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintah.

Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga